

BAB II

PROPAGANDA POLITIK DAN MEDIA

A. Pengantar

Bab ini akan menjelaskan tentang propaganda politik dari aspek teoritik dan juga media massa sebagai alat yang digunakan oleh propagandis untuk menyebarkan propaganda dalam penggiringan opini publik.. Selain itu juga dalam bab ini akan menjelaskan *Setting Background* dari dua film yang menjadi kajian dari penelitian ini yaitu Film “Pengkhianatan G-30S/ PKI” dan “Jagal”. Uraian tentang *Setting Background* pada kedua film ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif, latar belakang pembuatan film, pelaku, dan waktu pembuatan film. Sehingga akan membantu menganalisa perbandingan propaganda yang ada pada kedua film tersebut.

B. Propaganda Politik

Kegiatan propaganda mulai diperluas selama berabad-abad hingga di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.¹ Sementara itu, penggunaan propaganda semakin luas baru berkembang selama Perang Dunia I dan II, di mana sejumlah ahli politik mulai menggunakan propaganda untuk mengembangkan usaha-usaha pembiusan khalayak.

Propaganda berasal dari bahasa Latin *propagare* artinya cara tukang kebun menyemaikan tunas suatu tanaman ke sebuah lahan untuk memproduksi tanaman

¹ Ahmad Zakiyudin, “Teknik-Teknik Propaganda Politik Jalaludin Rakhmat (Studi kasus pada Kampanye Pemilu 2014 di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat)”, *Jurnal Academia Praja*, Vol.1, No.1 Februari 2018, h.3

baru yang kelak akan tumbuh sendiri. Dengan kata lain juga berarti mengembangkan atau memekarkan (untuk tunas).² Sementara itu propaganda menurut *KBBI*, merupakan penerangan (paham, pendapat, dan sebagainya) yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu.³ Jadi, dapat disimpulkan bahwa propaganda adalah sebuah cara atau strategi yang terstruktur, dilakukan untuk menggiring opini publik oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Propaganda tidak hanya menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya.

Propaganda adalah suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan tingkah laku dari penerimaan komunikasi seseorang dengan pola yang telah ditetapkan oleh komunikator. Salah satu ahli propaganda yang berpengaruh, Harold D. Laswell, melalui karya klasiknya, *Propaganda Technique in The World War*, pada tahun 1927 mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk mendefinisikan propaganda adalah mengacu pada peranan propaganda untuk mengontrol pendapat umum melalui pesan-pesan simbolis yang signifikan, atau untuk berbicara lebih kongkrit dilakukan lewat cerita, rumor, laporan, gambar yang belum tentu akurat.

Laswell menilai propaganda membawa masyarakat dalam situasi kebingungan ragu-ragu dan terpaksa pada suatu yang licik yang tampaknya menipu

² Dikutip dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/propaganda>, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 21.20

³ Dikutip dari <http://KBBI.Web.id/propaganda>, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 21.30

dan menjatuhkan. Propaganda dianggap sebagai proses diseminasi informasi untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat dengan motif indoktrinasi. Sementara itu menurut Onong Uchyana Effendy propaganda adalah komunikasi yang dilakukan secara berencana, sistematis dan berulang-ulang untuk mempengaruhi seseorang, khalayak atau bangsa agar melaksanakan kegiatan tertentu dengan kesadaran sendiri tanpa paksa atau dipaksa.⁴

Propaganda acapkali hanya dimaknai secara terbatas sebagai informasi palsu yang dimaksudkan untuk memantapkan apa yang telah diyakini orang kebanyakan. Asumsinya, jika seseorang mempercayai sesuatu itu salah, maka mereka senantiasa didera keraguan, karena keraguan itu menggelisahkan, orang lantas bersemangat untuk membuangnya, dan karena itu mereka menjadi terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh mereka yang memiliki otoritas. Bukan hal yang aneh jika propaganda menggunakan teknik-teknik penyampaian pesan yang meyakinkan meski palsu. Lazimnya pesan-pesan itu mengidap sesat logika karena sang propagandis hanya berusaha meyakinkan, tanpa memperdulikan kesahihan pesannya.

Propaganda dalam politik memainkan peran yang sangat penting karena merupakan satu di antara pendekatan persuasi politik selain periklanan dan retorika. Dalam praktiknya, propaganda mengelaborasi pesan politik dunia mendapat pengaruh secara persuasif. Hampir seluruh pendekatan persuasi kepada khalayak

⁴ *Ibid.*, h.5

di era Reformasi ini menempatkan media massa sebagai instrumen saluran yang mesti digunakan.⁵

Karakteristik utama kegiatan propaganda adalah sebagai komunikasi satu-kepada-banyak. Propaganda di media banyak dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan ataupun memperkuat legitimasi. Propagandis adalah seorang atau sekelompok kecil yang menjangkau khalayak kolektif yang lebih besar. Dalam kegiatan ini, ada banyak tujuan yang ingin dicapai dalam praktik propaganda. Propaganda memiliki tiga tujuan yakni:⁶

1. Mempengaruhi opini publik. Propaganda tidak hanya mengkomunikasikan fakta-fakta yang dapat mempengaruhi opini publik terhadap suatu isu tertentu. Jadi, salah satu tujuan propaganda adalah mengubah pandangan/persepsi publik tentang suatu tindakan yang akan diikuti sesuai dengan pendapat tersebut. Perubahan pendapat itu bisa bersifat positif ataupun negatif.
2. Memanipulasi emosi. Propaganda dapat dilakukan dalam beberapa teknik seperti memanipulasi kata, suara, simbol pesan non verbal, agar dapat membangkitkan emosi *audiens*, bahkan sering dilakukan dengan cara yang membahayakan bagi para propagandis.
3. Menggalang dukungan atau penolakan. Sasaran utama propaganda adalah mengubah sikap dan perilaku target untuk mendukung atau

⁵ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h.345

⁶ M. Alif Mahmudi, "Propaganda dalam Film (Analisis Teknik Propaganda Anti-Iran dalam Film Argo)", *Jurnal Komunikasi PROFETIK*, Vol. 06, No 2, Oktober 2013, h.86

menolak suatu isu tertentu. Tujuan propaganda ini adalah mengubah suatu posisi sikap dan perilaku seseorang terhadap perilaku lain.

Sedangkan menurut Laswell (1927) terdapat empat tujuan utama propaganda, yaitu:⁷

1. Untuk menumbuhkan kebencian terhadap musuh.
2. Untuk melestarikan persahabatannya sekutu.
3. Untuk mempertahankan persahabatan dan, jika mungkin, untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang netral.
4. Untuk menghancurkan semangat musuh.

Di dalam buku *Propaganda Media Teori dan Studi Kasus Aktual*,⁸ Ellul (dalam Heriyanto) membuat tipologi propaganda yang menarik. Menurutnya, ada enam tipe propaganda politik yaitu sebagai berikut .:

1. Propaganda Politik. beroperasi melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek. Biasanya melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai, atau golongan berpengaruh untuk mencapai tujuan strategis atau taktis. Propaganda politik dapat merupakan kegiatan komunikasi politik yang dilakukan secara terencana dan sistematis dengan menggunakan sugesti (mempermainkan emosi) untuk mempengaruhi, membentuk, atau membina opini publik.
2. Propaganda Sosial. Propaganda ini berlangsung secara berangsur-angsur, sifatnya merembes ke dalam lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan politik.

⁷ Andi Youna Bachtiar, *Propaganda Media Teori dan Studi Kasus Aktual*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.15

⁸ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h.334-337

melalui propaganda, orang disuntik dengan suatu cara hidup atau ideologi. Hasilnya, suatu konsepsi umum tentang masyarakat yang dengan setia dipatuhi oleh setiap orang, kecuali beberapa orang yang dianggap sebagai “penyimpangan” (*deviants*).

3. Propaganda Agitasi, yaitu mempengaruhi orang lain agar bersedia memberikan pengorbanan yang besar bagi tujuan yang langsung, mengorbankan jiwa mereka dalam usaha mewujudkan cita-cita dalam tahap-tahap yang merupakan suatu rangkaian. Biasanya, propaganda jenis ini diisi dengan sejumlah doktrin bahkan upaya “cuci otak” guna mendapatkan loyalitas dari target atau sasaran propaganda
4. Propaganda Integrasi, yaitu menggalang kesesuaian di dalam mengejar tujuan-tujuan jangka panjang. Melalui propaganda ini, orang-orang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan yang mungkin tidak akan terwujud dalam waktu bertahun-tahun. Propaganda ini mirip jenis propaganda sosial yang bekerja tidak dalam hitungan hari atau minggu, melainkan dalam suatu rentang yang panjang dan bertahap.
5. Propaganda Vertikal, yakni tindakan propaganda yang biasanya memanfaatkan kanal-kanal yang bersifat *one-to-many communication*, atau komunikasi dari orang/satu pihak ke banyak orang dalam waktu serentak (*massive*). Propaganda ini memang tidak semata identik dengan media massa, bisa juga melalui sebuah struktur organisasi yang memungkinkan dalam waktu singkat seluruh komponen organisasi berpengaruh.

6. Propaganda Horizontal, yaitu kegiatan propaganda yang berlangsung di dalam kelompok (antara warga kelompok) ketimbang dari pemimpin kepada anggota kelompoknya, dengan mengandalkan komunikasi interpersonal yang bersifat dialogis. Propaganda horizontal justru lebih tertarik mengembangkan jejaring dengan sesama teman, kolega, dan sejumlah organisasi lainnya.

Sedangkan para ahli komunikasi mengelompokkan propaganda berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan sifatnya, sumbernya, dan juga sistemnya.⁹

1. Menurut Sifat

Jika dikaji berdasarkan sifatnya propaganda ada tiga macam yaitu:

- a. *White Propaganda* adalah propaganda yang sifatnya jujur, benar, sportif menyampaikan isi (*content*) pesan, serta sumbernya jelas. *White propaganda* biasanya datang dari suatu sumber yang dikenali, seperti standar dan teknik *public relation* dan presentasi berat sebelah dari suatu argumentasi.
- b. *Black Propaganda* merupakan jenis propaganda yang secara licik, palsu, tidak jujur, dan menuduh sumber lain melakukan kegiatan tersebut. *Black Propaganda* ditandai oleh presentasinya tentang informasi palsu untuk menimbulkan suatu tanggapan yang diinginkan, dan sering digunakan di dalam rahasia militer atau tempat untuk

⁹ Andi Youna Bachtiar, *Propaganda Media Teori dan Studi Kasus Aktual*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.16-17

berlindung operasi psikologi dan oleh jaringan organisasi besar seperti pemerintah atau jaringan terroris.

- c. *Grey Propaganda* merupakan propaganda yang sumber kurang jelas tujuannya atau samar-samar, sehingga menimbulkan keraguan. *Grey Propaganda* mungkin datang dari suatu iklan sumber menyatakan dirinya netral atau ramah, dan menghadirkan banyak informasi yang menyesatkan dalam suatu cara yang lebih tersembunyi/membahayakan dibanding *White Propaganda*.

2. Menurut Sumber

Berdasarkan sumbernya, para ahli komunikasi mengklasifikasikan sebagai berikut :¹⁰

- a. *Concealed*, sumber tertutup.

Jadi berita yang disampaikan oleh propagandis tidak disampaikan dengan jelas atau terang, sehingga penerima pesan tidak mengetahui sumber berita tersebut.

- b. *Revealed*, sumber jelas-terbuka.

Berita yang disebarkan berdasarkan sumber-sumber *real*. Jadi dapat diartikan data-data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya .

¹⁰ *Ibid.*, h.17-18

- c. *Deleyed Revealed*, sumber lambat laun terbuka-jelas.

Sumber beritanya tidak disertakan langsung. Namun, lambat laun pada akhirnya terbuka dengan jelas.

3. Menurut Sistem

Adapun menurut sistem propaganda itu dilakukan, ada beberapa cara, yaitu:

- a. Menggunakan simbol-simbol (*symbolic interaction*), propaganda jenis ini menggunakan lambang-lambang komunikasi yang penuh arti, yaitu: bahasa (lisan atau tulisan).
- b. Menggunakan perbuatan nyata, *propaganda of the dead*. Propaganda jenis ini menggunakan tindakan nyata untuk memaksa komunikan penerima pesan dan melakukan tindakan seperti apa yang diharapkan oleh komunikator.

Ketidakmampuan manusia berkomunikasi menyebabkan ia seperti “katak dalam tempurung”, yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman serba terbatas. Berbagai ide, gagasan, keinginan, dan tuntutannya tidak bisa tersalurkan dan diketahui orang lain. Dalam posisi ini komunikasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan yang menggunakan bunyi ujaran, lisan ataupun media tertulis semata yang sering disebut sebagai sifat verbal.

Proses komunikasi yang dilakukan dalam interaksi antar manusia terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan. Lingkup komunikasi juga menembus dimensi politik dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi diawali oleh sumber

(*source*) baik individu maupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain.¹¹

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, *Communicatio*, asal katanya *Communis* = sama. Kesamaan arti atau makna mengenai sesuatu. Secara terminologi komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Secara pragmatis komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.¹² Jadi dapat ditarik kesimpulan, komunikasi merupakan cara manusia untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang dimaksudkan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima baik secara lisan, ataupun tulisan diiringi gerak-gerik, sikap tubuh atau mimik, serta lambang-lambang lainnya..

Propaganda memiliki keterkaitan erat dengan komunikasi politik. sehingga dapat diartikan bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang ada pencapaian tujuan dan digunakan untuk menghubungkan pikiran-pikiran politik yang ada di masyarakat.¹³ Namun apabila dikaitkan dengan propaganda maka kegiatan propaganda merupakan bagian dari kegiatan komunikasi.

¹¹ Rosiana Eka Putri, "Komunikasi politik (Model Komunikasi Politik Antar Fraksi dalam Pembentukan Norma UU Pilkada Secara Demokratis)", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 5, Nomor. 1 Maret 2015, h.52

¹² Moeryanto Ginting Munthe, "Propaganda dan Ilmu Komunikasi", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.2, Nomor 2 Desember 2010, h.42

¹³ *Ibid.*, h. 43

C. Media Massa

Dalam komunikasi, faktor media menduduki peran yang sangat penting dalam proses penyebaran pesan. Bahkan bisa dikatakan, suatu pesan bisa efektif atau tidak, tersebar luas atau tidak sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih media tersebut. Kesalahan memilih media tentu akan mengakibatkan pesan yang disampaikan kurang mengena. Ada beberapa media yang biasanya digunakan dalam propaganda yaitu, media massa, buku, film, dan selebaran. Akan tetapi media yang efektif digunakan sebagai alat propaganda yaitu media massa dan film.

Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai dipergunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Kata media berasal dari bahasa latin *Medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan kata massa menurut *KBBI* ialah sejumlah besar benda (zat dan sebagainya) yang dikumpulkan (disatukan) menjadi satu (atau kesatuan).¹⁴ Karena itu, dapat disimpulkan bahwa media massa adalah sebuah alat atau pengantar untuk menyampaikan sebuah informasi tertentu.

Menurut *Kamus Politik* karya Roger Scruton media massa yaitu semua alat dengannya masyarakat menerima komunikasi, baik mereka berada dalam kontrol masyarakat maupun tidak. Banyak pemikiran di masa sekarang ditujukan kepada isu tentang kontrol terhadap media, dan perbedaan yang dibuat pada muatan komunikasi kontrol tersebut.¹⁵

¹⁴ Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), Cet-1, h.399

¹⁵ Roger Scruton, *Kamus Politik*, terjemah Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet ke-1, h.593

Pada masa Plato, media massa sudah diyakini mempunyai pengaruh. Karena itu, ia membatasi bahan-bahan bacaan untuk masyarakat tertentu. Sejauh studi yang dilakukan para ahli, interpretasi media massa menjadi pertimbangan bagi sebuah gerakan sosial.¹⁶

Media massa memainkan peranan penting dalam mengkonsumsi sebuah perubahan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan. Kehadiran media juga membawa perubahan besar bagi masyarakat dunia. Kecepatan media telah berhasil membawa orang diseluruh dunia menjadi lebih dekat. Selain itu juga, media massa memberikan suatu sistem dalam bentuk pesan komunikasi dan simbol ditunjukkan kepada khalayak. Fungsi ini untuk meyakinkan, menginformasikan, menanamkan khalayak tentang nilai, kepercayaan, sikap yang mengintegrasikan mereka dalam suatu struktur dan lingkungan sosial yang lebih besar.

Dalam konteks era Reformasi, institusi media massa seperti televisi dan surat kabar dipercaya memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan produksi, reproduksi, dan distribusi pengetahuan secara signifikan. Serangkaian simbol-simbol yang memberikan makna tentang realitas “ada” dan pengalaman dalam kehidupan bisa ditransformasikan media massa dalam lingkungan publik sehingga bisa diakses anggota masyarakat secara luas. Banyak pihak yang terlibat dalam pemanfaatan media massa sebagai instrumen pemenuhan kepentingannya. Sebut saja negara (*state*), pasar (*market*), kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁶ Nurudin, *Komunikasi Propaganda*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2008), h. 45

¹⁷ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h.332

Media massa yang bekerja untuk menyampaikan informasi dapat membentuk, mempertahankan, atau mendefinisikan citra.¹⁸ Media massa juga dapat dijadikan sebagai alat kepentingan dan propaganda. Pendapat hampir senada dikemukakan Suryadi. Menurutnya, sistem komunikasi politik terdiri dari elit politik, media massa, dan khalayak. dari kedua pendapat tadi, dapat kita temui posisi penting media dalam propaganda politik.¹⁹

Untuk memperkuat argumen bahwa media sangat penting dalam proses propaganda politik, ada beberapa karakteristik dari media massa. Media massa merupakan jenis media yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Menurut Denis McQuail, terdapat ciri-ciri khusus media massa, di antaranya adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Memproduksi dan mendistribusikan “pengetahuan” dalam wujud informasi, pandangan, dan budaya. upaya tersebut merupakan respon terhadap kebutuhan sosial kolektif dan permintaan individu. Dalam konteks propaganda, kerja produksi dan distribusi ini akan efektif untuk mewujudkan informasi, pandangan, dan budaya sesuai dengan yang diharapkan propagandis.

¹⁸ Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), Cet-1, h. 401

¹⁹ Andi Youna Bachtiar, *Propaganda Media Teori dan Studi Kasus Aktual*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.29

²⁰ Gun Gun Heryanto, *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h.345

- b. Menyediakan saluran untuk menghubungkan orang tertentu dengan orang lain dari pengirim ke penerima dan dari khalayak kepada anggota khalayak lainnya. dalam konteks propaganda, sangat urgen dalam proses pengidentifikasian dari khalayak sebagai anggota kelompok, baik itu partisan partai, anggota ideologi tertentu, atau dalam nasionalisme sebuah negara.
- c. Media menyelenggarakan sebageian besar kegiatannya dalam lingkungan publik. Dalam konteks propaganda merupakan suatu hal yang strategis, karena tujuan dari persuasinya ini juga adalah manipulasi psikologi khalayak.
- d. Partisipasi anggota khalayak dalam institusi pada hakikatnya bersifat sukarela, tanpa adanya keharusan atau kewajiban sosial. Ini relevan dengan sifat persuasi yang bukan berupa pembicaraan kekuasaan. Dalam bukunya Gun Gun Heryanto *Media dan Komunikasi Politik*, menurut Dan Nimmo, mengutip Harold D. Laswell mengungkapkan bahwa pembicaraan kekuasaan lebih dekat kepada kekerasan dan ancaman ketimbang persuasi.
- e. Institusi media dikaitkan dengan industri pasar karena ketergantungannya pada imbalan kerja, teknologi, dan kebutuhan pembiayaan. Ini merupakan tuntutan yang seringkali mengarahkan media massa untuk lebih menonjolkan aspek komersialnya.
- f. Meskipun media itu sendiri tidak memiliki kekuasaan, namun institusi ini selalu berkaitan dengan kekuasaan negara karena adanya

kesinambungan pemakaian media. Dalam konteks propaganda, media massa menjadikan dirinya sebagai medium pesan politik sehingga kenyataannya kekuasaan dan pengaruh secara terus menerus diproduksi dan didistribusikan oleh media massa.

D. Propaganda Politik dan Media Massa

Propaganda politik melalui media massa sebenarnya merupakan upaya mengemas isu, tujuan, pengaruh, dan kekuasaan politik dengan memanipulasi psikologi khalayak. Begitu pentingnya media, sehingga Carter sebagaimana dikutip Bartholomew H. Sparrow, menyebutkan sebagai institusi kekuatan keempat dalam suatu pemerintahan atau *The Fourth Branch of Government*. Dalam pelaksanaannya, propaganda di media massa juga tidak bisa menyampingkan beberapa hal yang dikenal dalam rumusan Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese sebagai model “*Hierarchy of Influence*”.²¹

Propaganda bisa berdampak negatif atau positif. Propaganda yang bersifat positif tak perlu dilawan kalau memang untuk kepentingan masyarakat. Sebab propaganda positif memungkinkan masyarakat mencapai suatu tingkat kemajuan yang lebih baik jika propaganda berdampak negatif dan propaganda merupakan hal yang paling ampuh untuk memperkuat legitimasi dan mendapatkan kekuasaan, terutama pada rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di era Orde Baru propaganda politik yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto antara lain:

1. Propaganda menampilkan citra baik kepribadian pemimpin.

²¹ *Ibid.*, h.348

2. Propaganda pembangunan ekonomi.
3. Propaganda dengan organisasi berbasis militer.
4. Propaganda sakralisasi Pancasila dan UUD 1945.
5. Propaganda penertiban politik dan azas tunggal, dan
6. Propaganda dengan politisasi agama.

Dari keenam propaganda politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, propaganda dengan menampilkan citra baik kepribadian pemimpin yang masih bertahan sampai sekarang.²² Propaganda yang dilakukan Presiden Soeharto ini ialah dengan membuat sebuah film dengan menyudutkan bahwa dalang dari peristiwa berdarah pada 30 September 1965 yang menewaskan tujuh jenderal adalah PKI.

Terlepas dari perdebatan yang tak kunjung usai tentang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), ambisi pribadi, atau usaha menyelamatkan negara, saat itu kekuasaan presiden Soekarno semakin tidak mendapatkan tempat. Menurut Magins Suseno, yang mengaku antikomunis, “Supersemar menjadi legitimasi pengambilalihan kekuasaan oleh Soeharto dan langsung melarang Partai Komunis Indonesia dan segera tanpa menghiraukan proses Presiden Soekarno menangkap sekitar 12 menteri kabinet 100 menteri, lalu membentuk kabinet baru. Sejak tanggal itu, kekuasaan efektif di negara Republik Indonesia terletak ditangan Soeharto”.²³

²² Nurudin, *Komunikasi Propaganda*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2008), h.183.

²³ Ariel Haryanto, “Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa”, *Majalah Tempo* edisi 1- 7 Oktober 2012, h.119

PKI dinyatakan terlarang mulai 12 Maret 1966, sehari setelah Soeharto menerima Supersemar. Sehari sebelumnya, PKI masih mejadi partai sah dan terbesar di Indonesia, dan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Namun, pada tanggal itu, ratusan ribu warga Indonesia sudah dibunuh dengan tuduhan mendukung PKI. Pembantaian terhadap PKI dikisahkan sebagai penumpasan terhadap “partai terlarang”, padahal mereka sudah dibantai sebelum dilarang. Sejumlah menteri kabinet negara dan para pendukung setia Prseiden Soekarno ditahan dan diadili rezim Orde Baru dengan tuduhan absurd, yakni memberontak terhadap pemerintahan yang mereka pimpin sendiri. Presiden Soekarno dikenai tahanan rumah, hingga meninggal dalam keadaan merana.

E. Film “Pengkhiatanan G-30S/ PKI” dan “Jagal” (*Setting Background*)

Di kalangan sejarawan, gugatan terhadap gambaran masa lalu biasa diajukan meskipun disaat semua berjalan lancar seperti biasa saja. Gugatan sejarah itu biasa juga dlakukan oleh para politisi ketika mereka melihat gambaran masa lalu itu merugikan klaim politik mereka atau bila gambaran itu mereka rasakan terlalu kering untuk dapat memperkuat landasan politik mereka.²⁴

Ada beberapa peristiwa dalam sejarah nasional yang bukan saja tercatat dan teringat. Sehingga menjadi bagian dari ingatan kolektif bangsa, tetapi juga diperlakukan sebagai simbol dan bisa juga dijadikan sebagai bagian dari mitos. Tetapi ada juga peristiwa yang di saat terjadinya bukan saja langsung dirasakan

²⁴ Taufik Abdullah, “Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965”, *Jurnal Sejarah*, Vol. 9 Tahun 2000, h.3

sebagai awal dari perkembangan yang membatasi “masa kini” dengan “masa lalu”, tetapi juga merupakan pengalaman *real* yang mencengkap.²⁵

1. Film (“Pengkhianatan G-30S/ PKI)

Peristiwa sejarah yang terjadi pada 30 September 1965 yang menewaskan tujuh jenderal TNI AD yang dikenal dengan sebutan Pahlawan Revolusi (sekarang) masih simpang siur kebenarannya atau bisa dibilang adanya ketidakjelasan mengenai peristiwa tersebut. Pembantaian 1965-1966 merupakan faktor terkuat dan paling mutakhir yang ikut membentuk watak dan luka kehidupan sosial Indonesia masa kini. Dunia mencatat pembantaian 1965-1966 sebagai salah satu peristiwa paling biadab dalam sejarah modern. Tapi, di negerinya sendiri, peristiwa itu lenyap dari buku teks sejarah dan diskusi publik. Mayoritas generasi pelaku, korban, dan saksi mata cenderung bungkam.²⁶ Banyak pendapat/persepsi publik mengenai peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 tersebut sehingga membuat publik kebingungan akan kebenaran peristiwa pertumpahan darah yang terjadi di Indonesia.

Perbedaan pendapat mengenai peristiwa G-30S berasal dari sejarawan, kalangan intelektual, aktivis, anggota dari partai komunis, bahkan masyarakat.²⁷ Kisah kejahatan tiada tara pada tahun 1965-1966 terhadap korban yang dituduh ‘komunis’ disebarluaskan secara terbalik sebagai kisah kejahatan, pengkhianatan, dan pemberontakan oleh komunis.²⁸

²⁵ *Ibid.*, h.5

²⁶ Ariel Haryanto, “Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa”, *Tempo* edisi 1- 7 Oktober 2012, h.118

²⁷ *Ibid.*, h.120

²⁸ Taufik Abdullah, “Perdebatan Sejarah dan Tragedi 1965”, *Jurnal Sejarah*, Vol. 9 Tahun 2000, h.3

Dalam buku *Terperpu Mengungkapkan Pengkhianatan PKI Pada Tahun 1965 dan Proses Hukum Bagi Para Pelakunya*,²⁹ dapat disimpulkan bahwa peristiwa ataupun pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965 itu didalangi oleh Partai Komunis Indonesia dan pada akhirnya pemberontakan itu dapat diatasi oleh TNI Angkatan darat yang di Komandoi oleh Soeharto.

Pada 30 September 1965, beberapa gelintir perwira militer menengah yang menamakan Gerakan 30 September menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi. Setelah pasukan Soeharto menumpas gerakan ini, disebarluaskan propaganda bahwa gerakan itu mewakili PKI. Pimpinan dan anggota Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI), yang berafiliasi ke PKI, ditahan, diperkosa, dan disiksa. Namun dalam koran militer, sejarah resmi, Museum Lubang Buaya, dan Film “Pengkhianatan G-30S/ PKI”, para korban itu digambarkan sebagai kaum tidak bermoral yang mencincang mayat tujuh jenderal. Hasil otopsi resmi, oleh dokter yang diangkat Soeharto, dinyatakan tidak ada mayat di lubang buaya yang disayat-sayat. 30 tahun mereka menjadi bulan-bulanan banjir propaganda, indoktrinasi, fitnah, penipuan sejarah, pembodohan, dan teror negara.³⁰

Dalam buku *Titik silang Jalan kekuasaan Tahun 1965*, Gerakan 30 September dalam aksinya sesungguhnya juga menggunakan pasukan reguler Kostrad yaitu Batalyon 454 dan Batalyon 530 yang sejak tanggal 30 September pagi telah berada di lapangan merdeka, di muka istana merdeka. Tetapi

²⁹ Aco Manafe, *Terperpu Mengungkapkan Pengkhianatan PKI Pada Tahun 1965 dan Proses Hukum bagi Paa Pelakunya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008), cet ke-2.

³⁰ *Ibid.*, h.2

selanjutnya pasukan-pasukan yang berada di bawah Kostrad juga, yaitu Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat (RPKAD), digunakan untuk menumpas Gerakan 30 September. Komandan Kostrad pada waktu itu adalah Soeharto sendiri.³¹

Soeharto mengetahui akan adanya gerakan yang dilakukan oleh perwira-perwira muda pada tanggal 30 September malam. Semula ia menempatkan diri sebagai orang yang berlayar di atas dua perahu, tetapi ia dengan sangat licik menutup dirinya kedua belah pihak yang sedang bertentangan. Kalau tindakan yang dilakukan perwira-perwira muda itu berhasil mengagalkan kup dewan jenderal, ia buat sementara waktu akan turut dengan mereka, menggunakan keberhasilan mereka untuk meningkatkan dan memperkuat kedudukan dan kekuasaannya, sambil menunggu saat yang paling menguntungkan untuk merebut semua kekuasaan, memukul PKI dan menyingkirkan Soekarno.³²

Soeharto kepada presiden melalui kolonel Bambang Widjanarko itu, memperlihatkan bahwa Soeharto, dengan menggunakan G-30S (Untung, Latief, Supardjo) dan Getok (Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo), mulai 1 Oktober 1965, secara *de facto* menjadi penguasa Indonesia, sebagai langkah awal untuk secara *de jure* menguasai Indonesia. Beginilah Soeharto melakukan dan memulai kudetanya, namun PKI yang dituduh melakukan pemberontakan.

³¹ Rum Aly, "Titik silang Jalan kekuasaan Tahun 1965, Mitos dan Dilema: Mahasiswa dalam Proses Perubahan Politik 1959-1970", (Jakarta : Kata Hasta Pustaka, 2006), h.45

³² *Ibid.*, h. 47

Kalau diikuti penjelasan Mr. Y. Pohan, bahwa sesungguhnya Soeharto berlayar di atas dua perahu, maka baik G-30S maupun Gestok adalah berada dalam pimpinan Soeharto, atau dengan kata lain, Soeharto adalah otaknya G30S dan juga otaknya Gestok.

Dalam tulisannya yang berjudul *Malam Jahanam*, Harsutejo menjelaskan: “perlu ditambahkan bahwa rencana pengambilan (penculikan) para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa ja sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latief, bekas anak buah Soeharto yang menjadi salah seorang penting dalam G-30S. Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apapun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Soeharto yang telah berjasa mengepung Istana merdeka pada 11 Maret 1966. Masih dapat ditambah lagi bahwa keenam jenderal dibunuh tersebut memiliki riwayat pemusuhan internal dengan Soeharto karena Soeharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro.³³

Kalangan militer dibawah koordinasi Pangkostrad Mayjen. Soeharto melakukan gerakan penumpasan sambil memperkenalkan “teorinya” tentang keberadaan PKI sebagai dalang G-30S. Isu keterlibatan PKI sebagai aktor utama G-30S yang dikebangkan Soeharto ternyata mampu menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpinnya. Para pengikut Soeharto membuat rekayasa tentang keberadaan anggota-anggota Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) dan Pemuda Rakyat

³³ *Ibid.*, h.48

di Lubang Buaya (karena tempat itu adalah tempat latihan sukarelawan Ganyang Malaysia, namun ditutup sejak 2 September 1965), dan membenarkan isu dan fitnah bahwa anggota-anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat menyiksa para jenderal sebelum dibunuh di Lubang Buaya.

Sejak itu, tersebar propaganda besar-besaran bertema “Pengkhianatan G-30S/ PKI”. Kehidupan sosial diatur oleh sebuah kerangka logika dan retorika yang absurd, yang dari saat menjungkir balikkan norma politik negara, sistem pendidikan dan pengetahuan umum di sekolah dan media massa, juga kehidupan sehari-hari.³⁴

2. Film “Jagal” (*The Act of Killing*)

Ketika pemerintah Indonesia digulingkan oleh militer pada 1965, Anwar dan kawan-kawan naik pangkat dari preman ke kelas teri pencatut karcis bioskop menjadi pemimpin pasukan pembunuh. Mereka membantu tentara membunuh lebih dari satu juta orang yang dituduh komunis, etnis thionghoa, dan intelektual, dalam waktu kurang lebih satu tahun. Sebagai seorang algojo dalam pasukan pembunuh yang palinh terkenal kekejamannya di medan, Anwar telah membunuh ratusan orang dengan tangannya sendiri.

Jagal bercerita tentang para pembunuh yang menang, dan wajah asyarakat yang dibentuk oleh mereka. Tidak seperti para pelaku genosida Nazi atau Rwanda yang menua, Anwar dan kawan-kawannya tidak pernah sekalipun dipaksa oleh

³⁴ Ariel Haryanto, “Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa”, *Majalah Tempo* edisi 1-7 Oktober 2012, h.118

sejarah untuk mengakui bahwa mereka ikut serta dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, mereka justru menuliskan sendiri sejarahnya yang penuh kemenangan dan menjadi panutan bagi jutaan anggota Pemuda Pancasila (PP).

Film “Jagal” adalah sebuah perjalanan menembus ingatan dan imajinasi para pelaku pembunuhan dan menyampaikan pengamatan mendalam dari dalam pikiran para pembunuh massal. Jagal adalah sebuah mimi uruk impunitas ketika seseorang pembunuh dapat bercanda tentang kejahatan terhadap kemanusiaan di acara bincang-bincang televisi, dan merayakan bencana moral dengan kesantiaian dan keagungan *tap-dance*

Pada masa mudanya, Anwar dan kawan-kawan menghabiskan hari-harinya di bioskop karena mereka adalah preman bioskop, mereka menguasai pasar gelap karcis, dan pada saat yang sama menggunakan bioskop sebagai markas operasi untuk kejahatan yang lebih serius. Di tahun 1965, tentara merekrut mereka untuk membentuk pasukan pembunuh dengan pertimbangan bahwa mereka telah terbukti memiliki kemampuan melakukan kekerasan, dan mereka membenci komunis, yang berusaha memboikot pemutaran Film Amerika yang paling populer dan menguntungkan.

Anwar dan kawan-kawan adalah pengagum berat James dean, John Wayne, dan Victor Mature, mereka secara terang-terangan mengikuti gaya berpakaian dan cara membunuh dari idola mereka dalam film-film hollywood. Masih terpengaruh suasana, mereka menyeberang jalan ke kantor dan membunuh tahanan yang menjadi jatah harian setiap malam. Meminjam teknik dari Film Mafia, Anwar lebih menyukai menjerat korban-korbannya dengan kawat.

Dalam Film “Jagal”, Anwar dan kawan-kawan bersepakat untuk menyampaikan cerita pembunuhan tersebut kepada Sutradara, tetapi idenya bukanlah direkan dalam film dan menyampaikan testimoni untuk sebuah film dokumenter, mereka ingin menjadi bintang dalam ragam film yang sangat mereka gemari di masa mereka masih menjadi pencatut karcis bioskop. Sutradara menangkap kesempatan ini untuk mengungkapkan bagaimana sebuah rezim yang didirikan di atas kejahatan terhadap kemausiaan, yang belum pernah dinyatakan bertanggung jawab, memproyeksi dirinya dalam sejarah. Kemudian sutradara film menantang Anwar dan kawan-kawanya untuk mengembangkan adegan-adegan fiksi mengenai pengalaman mereka membunuh dengan mengadaptasi genre film favorit mereka, gangster, koboi, musikal, mereka menulis naskahnya dan memerankan diri sendiri, dan juga memerankan korban dengan diri mereka sendiri.

Dalam liputan khusus yang dilakukan LENTERA (Lembaga Pers Mahasiswa) yang diwakili oleh Hanny Yunda,³⁵ Alexio Alberto Caesar,³⁶ Galih Agus Saputra,³⁷ dan Bima Satria Putra³⁸ dapat disimpulkan bahwa Pembantaian terhadap PKI dikisahkan sebagai penumpasan terhadap “partai terlarang”, padahal mereka sudah dibantai setengah tahun sebelum dilarang dan masih berlangsung

³⁵ Hanny Yunda, “Suara Tangis dari Kebun Karet”, *LENTERA Wadah Diskursus Sivitas Fiskom UKSW (Salatiga Kota Merah)*, edisi Nomor 3 tahun 2015, h.12

³⁶ Alexio Alberto Caesar, “Hingga Tengaran Banjir Darah”, *LENTERA Wadah Diskursus Sivitas Fiskom UKSW (Salatiga Kota Merah)*, edisi Nomor 3 tahun 2015, h.13

³⁷ Galih Agus Saputra, “Mbah Jenggot”, *LENTERA Wadah Diskursus Sivitas Fiskom UKSW (Salatiga Kota Merah)*, edisi Nomor 3 tahun 2015, h.14

³⁸ Bima Satria Putra, “Bunyi Dor Tengah Malam”, *LENTERA Wadah Diskursus Sivitas Fiskom UKSW (Salatiga Kota Merah)*, edisi Nomor 3 tahun 2015, h.15

selama dua tahun dari peristiwa G-30S bahkan korban yang dibantai terkadang belum diketahui seorang anggota PKI atau bukan.

Sejumlah menteri kabinet negara dan para pendukung setia Soekarno ditahan dan diadili oleh rezim Orde Baru dengan tuduhan *absurd*, yakni memberontak terhadap pemerintahan yang mereka pimpin sendiri. Kisah kejahatan tiada tara pada 1965-1966 terhadap korban yang dituduh “Komunis” disebarluaskan secara terbalik sebagai kisah kejahatan, pengkhianatan, dan pemberontakan oleh komunis.³⁹

Pembunuhan massal yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sejumlah tempat lain di Indonesia bersifat spontan dan merupakan “ungkapan balas dendam” warga sipil terhadap PKI yang telah melakukan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat di Jakarta. Ditekankan oleh narasi pemerintah Orde Baru bahwa orang-orang komunis adalah “pengkhianat negara” yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi komunis yang Ateis.⁴⁰

Dua buku yang paling berpengaruh di ingatan publik terkait dengan kisah seputar gerakan pembunuhan perwira-perwira tinggi AD yaitu “buku putih”. Buku karya Nugroho Notosusanto yang terbit tahun 1968 berjudul tragedi nasional : percobaan Kup G-30S/ PKI di Indonesia dan buku Gerakan 30 September pemberontakan Partai Komunis Indonesia : latar belakang aksi, dan penumpasannya terbitan sekretariat negara Republik Indonesia tahun 1994. Kedua

³⁹ Ariel Haryanto, “Film, Teror Negara, dan Luka Bangsa”, *Tempo* edisi 1-7 Oktober 2012, h.119

⁴⁰ *Ibid.*, h.120

buku tersebut merupakan narasi yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru dan mencerminkan sikap resmi bagaimana pemerintahan Orde Baru menafsir dan mengambil tindakan terhadap Gerakan 30 September. Semua cerita, skenario dan juga pandangan-pandangan dalam melihat peristiwa itu mengacu pada cerita PKI yang menjadi dalang peristiwa G-30S.⁴¹

Buku yang terkait dengan tragedi 1965 berjudul *40 hari kegagalan G-30S* disusun oleh pusat sejarah Angkatan Bersenjata. Buku tersebut secara langsung terang-terangan menyalahkan dan menganggap PKI sebagai dalang dari peristiwa G-30S. Narasi resmi tersebut juga menitik beratkan kerja sama antara militer dan rakyat dalam “menggayang PKI” sambil menunjukkan “kekuatan tuhan” selalu berada di pihak yang “benar” buku ini menjadi penting bagi pemerintah Orde Baru karena merupakan tempalte awal dari pembentukan narasi resmi atas tragedi 1965.⁴²

Narasi resmi tentang tragedi 1965 pada mulanya muncul sebagai jawaban atas kesimpangsiuran dan ketidakjelasan situasi setelah terjadinya penculikan dan pembunuhan para perwira Angkatan Darat di Jakarta yang berakhir di sebuah sumur tua di wilayah lubang buaya. Dalam suasana yang serba membingungkan itu, ditambah dengan memanasnya keterangan santara pihak komunis dan nonkomunis, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Mayjend Soeharto merasa

⁴¹ Silvia Pristi Werdininggar, “Tragedi 1965 di Indonesia Perspektif Kambing Hitam rene Girard”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma), h.46

⁴² *Ibid.*, h.47

perlu untuk segera mungkin membuat sebuah narasi resmi yang mengklaim kebenaran atas narasi tersebut.⁴³

Agar narasi tersebut dapat diterima masyarakat diperlukan sebuah kontrol yang kuat terhadap media massa. Tak mengherankan, pada hari-hari pertama semenjak pecahnya peristiwa penculikan dan pembunuhan itu, informasi resmi yang beredar hanya bisa didapat masyarakat melalui surat kabar militer seperti harian Angkatan bersenjata dan berita Yudha.

Dapat dideskripsikan narasi-narasi pemerintah orde baru baik dalam bentuk literatur, ritual tahunan hari kesaktian pancasila, monumen pancasila sakti serta film dokumenter karya sutradara Arifin C. Noor yang berjudul “ Pengkhiantan G-30S/ PKI” sangatlah efektif mempengaruhi masyarakat Indonesia. Di antara sedikit kajian mengenai topik yang ada. Majalah mingguan tempo dan surat kabar harian kompas pernah melakukan jejak pendapat tentang persepsi masyarakat mengenai tragedi 1965 dan komunisme.⁴⁴

Dalam survei pada tahun 1999 Majalah Tempo menentukan bahwa 975 responden telah menonton film pengkhianatan itu dan dari angka tersebut 72% responden menganggap film tersebut sebagai sumber informasi utama mengenai apa yang terjadi pada 1 oktober 1965. Pada september 2002, kompas menerbitkan hasil survei mereka yang menunjukkan bahwa 75% responden melihat komunis itu sama dengan sifat “sadisties, ateis, dan amoral “. Lebih dari separuh responden juga setuju jika dikatakan bahwa komunis itu sama dengan pembunuh.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, h.47

⁴⁴ *Ibid.*, h.48

⁴⁵ Lihat *Tempo 3 Oktober 1999* dan *Jejak Pendapat Tempo pada 30 September 2002*, h.366

Politik Indonesia pada masa itu sangat kompleks. Menjelang tragedi September, konflik PKI dan partai politik lain memanas. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merasa di atas angin, menekan penduduk yang tidak sehaluan. Ketika keadaan berbalik, luapan pembalasan tak terkendali. Pembunuhan direstui oleh sesepuh masyarakat dan tokoh agama. Masa 1965-1966 tak bisa dinilai dengan norma dan nilai-nilai masa kini. Membaca sejarah kaum Indonesia pada masa itu dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial politik ekonomi pada masa itu pula.